

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### Untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo :

###### **Komunikasi :**

- a. Apakah ada sosialisasi tentang Kebijakan Over Dimension and Over Loading? Bagaimana bentuknya?
- b. Apakah ada koordinasi antar bidang terkait dengan implementasi kebijakan tersebut?

###### **Sumber Daya :**

- a. Apakah seluruh pegawai dan staff sudah mengetahui tentang kebijakan tersebut?
- b. Bagaimana kompetensi para pegawai? apakah memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut?
- c. Bagaimana dengan kesiapan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pegawai selama ini?

###### **Disposisi :**

- a. Apakah seluruh pegawai yang sudah diberikan tugas sudah berjalan dengan baik?
- b. Bagaimanakah sikap para pengguna ataupun pengusaha dengan adanya kebijakan tersebut?
- c. Apakah pegawai mengalami kendala terkait dengan pemahan dan implementasi kebijakan dilapangan?
- d. Apakah selama ini pengguna dan pengusaha masih banyak yang melanggar aturan?

###### **Struktur Birokrasi :**

- a. Apakah ada SOP pegawai dan staff dalam implementasi kebijakan Over Dimension and Over Loading?
- b. Apakah pegawai dalam melakukan terjun lapangan sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan?
- c. Apakah ada kerja Sama antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan Over Dimension Over Loading?

**Untuk Pengguna Angkutan Barang Industri:**

1. Apakah bapak mengetahui terkait aturan Over Dimension Over Loading?
2. Apakah sudah ada sosialisasi aturan Over Dimension Over Loading pada angkutan barang?
3. Apakah bapak paham tentang isi kebijakan tersebut?
4. Apakah bapak mematuhi pada peraturan terkait dengan muatan dan dimensi kendaraan?
5. Apakah pernah melihat dan mengalami teguran oleh dinas terkait terhadap jumlah muatan dan dimensi kendaraan?
6. Apakah bapak pernah melanggar aturan tersebut?
7. Menurut bapak apakah aturan tersebut harus diterapkan?
8. Apakah menurut bapak sanksi yang ditetapkan sudah sesuai?
9. Apakah aturan tersebut selama ini memberatkan para pengguna angkutan barang?

## Lampiran 2. Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara dengan Informan

Wawancara dengan Kepala Bidang Angkutan dan Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor



Wawancara dengan Bidang Pengendalian dan Operasional



Wawancara dengan Pengguna Angkutan Barang



Wawancara dengan Staff Lapangan

### Lampiran 3. Surat Permohonan Penelitian



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.  
 Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya ( 60118 )  
 Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 21 Maret 2023

Nomor : 0619/K/FISIP/III/2023  
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal  
 Perihal : Surat Permohonan Observasi

Kepada Yth. : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo  
 di-Tempat

Dengan hormat.

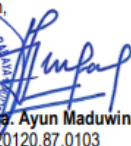
Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama	Alamat
1. Muhammad Alwan Yassin (1111900072)	Jl RA Mustika Tebel Timur RT 01 RW 06 Gedangan Sidoarjo

Guna melakukan pengambilan data di:

"Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo"

Dengan Judul: Implementasi Kebijakan Over Dimension and Over Loading Angkutan Barang Industri Di Kabupaten Sidoarjo  
 Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Dekan,  
  
 Dr. Drs. Ayun Maduwinarti, M.P  
 NPP-20120.87.0103

## Lampiran 4. Surat Rekomendasi Penelitian



### PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Raya A. Yani No. 4 Telepon. 031 8921954  
Email : bakesbangpolsidoarjo@gmail.com  
Website : bakesbangpol.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 06 April 2023  
Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Sidoarjo.  
di  
**SIDOARJO**

Nomor : 070/954/438.6.5/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan An. Sdr. MUHAMMAD ALWAN YASSIN

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Nomor : 070/3377/209/2023 tanggal 05 April 2023 Perihal **Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survey / Kegiatan / PKL / KKN / Magang / OJT**, maka bersama ini kami hadapkan :

Nama : MUHAMMAD ALWAN YASSIN  
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 23 Maret 2001  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Jl RA Mustika RT.01 RW.06 Desa Tebel Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo  
Instansi : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA / FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
INIM : 1111900072 NIK : 3515162303010003  
Judul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OVER DIMENSION AND OVER LOADING ANGKUTAN BARANG INDUSTRI DI KABUPATEN SIDOARJO**  
Penanggungjawab : Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP  
Peserta : -  
Bidang : Politik  
Tujuan : Permintaan Data, Wawancara, Penelitian  
Waktu : 10 April - 31 Mei 2023  
Telephone/Hp : 082115972449 Email : alwanyass123@gmail.com

Untuk melakukan Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan di Instansi/Wilayah Saudara guna kepentingan studi, dengan syarat-syarat/ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat/Lokasi Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan.
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi.
3. Yang bersangkutan diberi tugas sesuai relevansinya dengan mata kuliah/pelajaran di sekolah/perguruan tinggi.
4. Wajib melaporkan hasil Penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam kesempatan pertama.
5. Surat Keterangan ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan seperti tersebut di atas.
6. Melaksanakan Protokol Kesehatan pada saat melakukan Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan.

Demikian untuk menjadikan Maklum.

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Sidoarjo;
2. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Sdr. Yang bersangkutan.

#### KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh


Dr. MUSTAIN, M. Pd.J  
NIP. 196503111991031006

**Dr. MUSTAIN, M.Pd.I**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196503111991031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRf sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

## Lampiran 5. Kartu Bimbingan

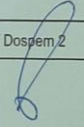








**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi  
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fsip@untag-sby.ac.id

---

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Alwan Yassin  
 NBI : 1111900072  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Dosen Pembimbing I : Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP  
 Dosen Pembimbing II : Drs. M. Kendry Widiyanto, M.Si.  
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Over Dimension and Over Loading Angkutan Barang Industri di Kabupaten Sidoarjo

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1	16/02-23	Bab I, II, perbaiki		
2	20/2023 2	Perbaiki LBM.		
3	7/3-2023	Bab I, II diperbaiki		
4	15/3/2023	ACC Bab 1 Perbaiki bab II, III & pedoman wawancara.		
5	21/3-2023	Melalui penyempurnaan ACC penelitian		
6	4/1/2023	ACC Turun lapangan		
7	3/2023 15	Revisi Bab 4 Lanjut pembahasan		



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi  
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

No.	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
8	15/2023 /5	Bab 4 ACC Bab 5 direvisi		
9	19/23	Bab 4-5 - ACC		
10	29/23 /5	ACC, daftar Ujian		

Catatan:

1. Kartu Bimbingan dibawa saat bimbingan
2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan dinyatakan telah selesai

Tanggal : 29-5-2023

Dosen Pembimbing I,

(Dida Rahmadanik, M.AP)

Dosen Pembimbing II,

(.....)

## Lampiran 6 Surat Keterangan Hasil Turnitin



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**  
**LABORATORIUM OTONOMI DAERAH**  
Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

---

### SURAT KETERANGAN

Nomor: 212/K/LOD/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

NPP : 20110170735

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Alwan Yassin

NBI : 1111900072

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.

Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 Mei 2023  
Kepala Lab. Otda,

Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP



## Lampiran 7. Perintah Revisi

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

### LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Alwan Yassin

NIM : 1111900072


Hari/ Tanggal Ujian : Jumat, 23 Juni 2023

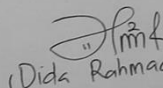
Catatan Perbaikan:

Cek typo

Lengkapi lampiran.

Surabaya, 26 Juni 2023  
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,

  
(Dida Rahmadanik, M.AP)

  
(Dida Rahmadanik, M.AP)

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

### LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Alwan Yassin

NIM : 1111900072

Hari/ Tanggal Ujian : Jumat, 23 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

Surabaya, 27 Juni 2023  
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,

  
Ach. Waddien Conu R

  
Ach. Waddien Conu R

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

### LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Alwan Yassin

NIM : 1111900072

Hari/ Tanggal Ujian : Jumat, 23 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

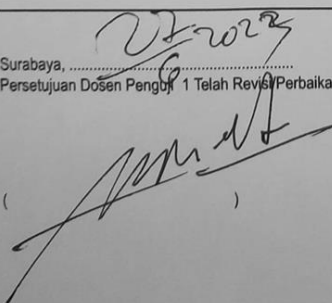
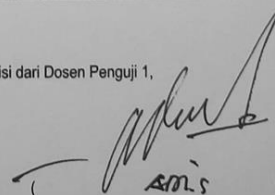
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Surabaya, .....  
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,  
(  ) (  )

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

## Lampiran 8. Hasil Turnitin Artikel Ilmiah

### Artikel Muhammad Alwan Yassin

#### ORIGINALITY REPORT

<b>11</b> %	<b>10</b> %	<b>5</b> %	<b>4</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>aksiologi.org</b> Internet Source	<b>2</b> %
<b>2</b>	<b>press.unisri.ac.id</b> Internet Source	<b>2</b> %
<b>3</b>	<b>repository.uin-suska.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>4</b>	<b>Siti Fatimah, Isnaini Rodiyah. "Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2020</b> Publication	<b>1</b> %
<b>5</b>	<b>jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>6</b>	<b>repository.uksw.edu</b> Internet Source	<b>&lt;1</b> %
<b>7</b>	<b>repository.upstegal.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1</b> %
<b>8</b>	<b>digilib.uinsa.ac.id</b> Internet Source	

		<1 %
9	id.123dok.com Internet Source	<1 %
10	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
11	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.unik-kediri.ac.id Internet Source	<1 %
13	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
14	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
15	Sintia Putri Febriani, Mimin Mintarsih. "Penegakan Hukum Dalam Kebijakan Zero Overdimension dan Overloading Terhadap Pengangkutan Barang", Reformasi Hukum, 2023 Publication	<1 %
16	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

## Lampiran 9. LoA Artikel Ilmiah



COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA  
DEPARTEMEN PENERBITAN

**PRAJA Observer: JURNAL PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK**

e-ISSN: 2797-0469, Jl. Nginden Intan Timur XV. No. 11 Surabaya, Indonesia

<https://www.aksiologi.org/index.php/praja/index>; e-mail: [prajajurnal@gmail.com](mailto:prajajurnal@gmail.com)



**PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik**

**1/09/2023/#1010**

**L.o.A**

**23/05/2023**

Kepada

**MUHAMMAD ALWAN YASSIN**

[alwanyass123@gmail.com](mailto:alwanyass123@gmail.com);

**DIDA RAHMADANIK**

[didarahma@untag-sby.ac.id](mailto:didarahma@untag-sby.ac.id);

**M. KENDRY WIDIYANTO**

[kenronggo@untag-sby.ac.id](mailto:kenronggo@untag-sby.ac.id);

Di

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

**INDONESIA**

Sehubungan dengan naskah artikel ilmiah yang saudara kirimkan ke redaksi jurnal PRAJA Observer, maka dengan ini redaksi informasikan bahwa naskah anda telah diproses untuk publikasi di Jurnal PRAJA Observer. Redaksi sangat mengapresiasi kontribusi naskah anda ke jurnal PRAJA Observer. Dan redaksi telah mengambil keputusan mengenai pengajuan naskah berjudul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OVER DIMENSION AND OVER LOADING (ODOL) ANGKUTAN BARANG INDUSTRI DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO**, yang diterbitkan pada bulan September Tahun 2023: Volume 3, No. 05 (2023).

Dengan keputusan redaksi adalah: "DITERIMA"

Hormat kami,

Editor in Chief,

**Kusnan**

PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik

<https://aksiologi.org/index.php/praja/index>



**Lampiran 10. Artikel Ilmiah****IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *OVER DIMENSION AND OVER LOADING*  
(ODOL) ANGKUTAN BARANG INDUSTRI DI DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SIDOARJO****Muhammad Alwan Yassin**

Program Studi Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[alwanyass123@gmail.com](mailto:alwanyass123@gmail.com);

**Dida Rahmadanik**

Program Studi Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[didarahma@untag-sby.ac.id](mailto:didarahma@untag-sby.ac.id);

**M. Kendry Widiyanto**

Program Studi Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[kenronggo@untag-sby.ac.id](mailto:kenronggo@untag-sby.ac.id);

**Abstrak**

Implementasi kebijakan tentunya menjadi yang terpenting dalam mewujudkan keinginan guna mencapai tujuan. Pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan oleh beberapa pihak terkait. Salah satunya kebijakan yakni *over dimension and over loading*. Kebijakan ini dibuat guna mengatasi kendaraan yang melanggar dengan tidak mematuhi aturan layak jalan. Pada implementasi tentunya perlu instansi terkait agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang dimana instansi terkait yang menangani kebijakan *over dimension and over loading* di Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian membahas terkait implementasi kebijakan *over dimension and over loading* angkutan barang industri di Kabupaten Sidoarjo hal ini bertujuan sejauh mana dalam melaksanakan kebijakan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pada Penelitian ini yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dimana dalam menemukan hasil penelitian dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan dengan baik berdasarkan indikator keberhasilan implementasi kebijakan. Mulai dari sosialisasi,

peningkatan sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, sertas struktur birokrasi. Namun hal ini perlu adanya konsistensi dan tindakan tegas lagi dikarenakan masih banyaknya kendaraan yang melanggar aturan. Diharapkan kerja sama antar pihak terkait bisa dilaksanakan mulai dari perusahaan, pengguna angkutan, serta pihak yang memungkinkan terlibat dalam aturan tersebut.

**Kata kunci :** *Kebijakan, Implementasi, Angkutan Barang, ODOL*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan sebuah negara dapat berjalan sesuai dengan rencana dipengaruhi oleh tata kelola negara tersebut. Negara yang dapat memaksimal potensi dan juga melakukan percepatan diberbagai bidang pengelolaan negara, dapat memenuhi seluruh kebutuhan warga negara. Dalam hal ini, sektor industri sendiri menjadikan salah satu sektor yang dapat dikatakan paling utama dalam meningkatkan kesejahteraan warga negara. Industri merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah negara yang dimana sebagai tumpuan masyarakat untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Sektor industri ini berkaitan dengan bidang ekonomi bagaimana melakukan kegiatan untuk bisa mendapatkan sebuah keuntungan dalam proses jual beli barang. Mengingat bahwa dengan adanya industri ini bisa memanfaatkan sumber daya yang lebih maksimal apalagi kita ketahui banyak sekali potensi untuk membuat sebuah produk jadi atau masih dalam setengah jadi tersebut yang setidaknya bisa memberikan sebuah manfaat dalam sebuah kebutuhan untuk masyarakat. Peran industri memanglah sangat penting namun dalam pengelolaannya juga sangatlah rumit bagaimana mengatur sebuah industri yang harus bisa memberikan dampak yang lebih apalagi dilingkungan masyarakat yang cukup banyak.

Seperti di Kabupaten Sidoarjo yang dimana sebagai salah satu sektor ekonomi terbesar di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah industri di berbagai sektor bidang dan tersebar di beberapa wilayah. Kabupaten Sidoarjo memang menjadi daerah yang memiliki jumlah pekerja yang banyak sehingga melihat kebutuhan yang harus dipenuhi juga harus berjumlah banyak. Disisi lain pengelolaan industri tidak hanya membuat dan menjual kepentingan dengan mendapatkan keuntungan. Adapun dalam segi operasional pengelolaan industri juga menjadi bagian utama, dimana segala pengiriman baik sebuah bahan dari luar dan juga mengirimkan barang untuk dijual ini menjadi pertimbangan yang sangat signifikan.

Pada Undang-Undang dijelaskan tentang penyelenggaraan angkutan barang dimana pelaksanaan angkutan segala sesuatu juga harus berpatokan pada peraturan tentang angkutan jalan terkait dengan batas muatan. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan selaku pemangku kepentingan untuk melaksanakan aturan



yang berlaku yakni pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 277 berbunyi “ Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)” (Indonesia, 2009). Terkait hal itu penindakan yang telah melanggar aturan angkutan barang juga di berlakukan sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan pada undang-undang sesuai dengan buku uji kendaraan muatan. Kebijakan tersebut dibuat ialah terkait dengan kendaraan yang melebihi kapasitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi muatan yang diangkut serta memaksakan untuk menambah jumlah dimensi agar memuat lebih banyak angkutan.

Berdasarkan dengan berbagai kondisi tersebut hal yang telah dilakukan baik oleh perusahaan, pemilik barang, pemilik kendaraan industri ini sangat membahayakan mereka. Hal ini masih terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang dimana masih adanya kendaran angkutan barang yang mengangkut barang secara berlebihan yang tidak sesuai dengan standar muatan. Terkait dengan adanya kendaraan membawa bahan industri yang melebihi dimensi dan muatan berlebih ini terjadi di jalan Lingkar Timur Kabupaten Sidoarjo dikarenakan memang banyak sekali area industri di sekitar wilayah tersebut dan juga sebagai jalur masuknya angkutan kendaraan besar untuk tidak melewati jalur kota. Maka dengan hal ini, ketika kendaraan yang tidak sesuai dengan standar untuk layak jalan pada angkutan barang industri dapat menyebabkan terjadinya permasalahan baik dalam hal keselamatan, infrastruktur jalan, kondisi lalu lintas, dan menyebabkan kondisi kendaraan akan semakin berkurang umur standar operasional. Kondisi tersebut juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo terkait dengan adanya kendaraan *Over Dimensi Over Loading* ini mengakibatkan di beberapa titik ruas jalan mengalami kerusakan sehingga setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalami kerugian sehingga anggaran yang digunakan sangatlah besar hal ini menjadi persoalan tersendiri (Krisna, 2021).

Dalam penelitian ini membahas terkait implementasi dari kebijakan ini yaitu tentang *over dimension and over loading* pada kendaraan angkutan barang industri yang ada di Kabupaten Sidoarjo apakah dalam pembutaan kebijakan ini sebagai solusi dalam mengatur operasional industri baik pada perusahaan industri maupun para

pengguna angkutan jalan itu sendiri dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kebijakan Publik**

Menurut Wahab bahwasanya kebijakan merupakan suatu langkah maju dengan melakukan suatu tindakan, tujuan-tujuan, dan penjelasan yang dinyatakan oleh pemerintah terhadap suatu persoalan. Langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan- penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). Istilah lain menyatakan bahwa, kebijakan sering diperlukan penggunaannya dengan tujuan, program keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar (Pramono, 2020).

### **Implementasi Kebijakan**

Pada dasarnya implementasi dalam artian etimologis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan saling berkaitan dimana aktivitas tersebut dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan menggunakan suatu alat sehingga mendapatkan suatu hasil. Kemudian dalam artian tersebut jika dihubungkan dengan suatu kebijakan bahwasanya implementasi kebijakan sendiri merupakan aktivitas untuk melaksanakan kebijakan yang berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sebuah alat ataupun sarana penunjang untuk mendapatkan tujuan kebijakan tersebut. (Tachjan, 2006)

Implementasi kebijakan sendiri terdapat bagaimana cara tertentu untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam hal ini pelaksanaan yang telah dilakukan dapat diketahui terkait dengan pola yang di implementasikan oleh para aktor atau pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini menurut kerangka pemikiran dari George Edwards III mengatakan bahwa terkait dengan keberhasilan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan public dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut (Pramono, 2020):

a. Komunikasi, terkait dengan suatu keberhasilan dalam implementasi tentunya sebagai pelaksana ataupun implementor bahwasanya dalam kebijakan diharuskan untuk mengetahui apa yang akan dilakukan. Dalam hal ini suatu yang menjadikan tujuan ataupun sasaran kebijakan diharapkan diberikan informasi atau transmisi kepada suatu kelompok tertentu yang menjadi target utama dalam kebijakan sehingga pada pelaksanaan kebijakan tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam implementasi kebijakannya.

b. Sumber Daya, dalam melaksanakan implementasi tentunya sumber daya menjadikan faktor yang sangat penting. Bahwa sejauh apapun kebijakan dapat dikomunikasikan dengan baik tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai maka proses implementasi akan mengalami gangguan hal ini tentunya terdapat beberapa sumber daya yang menjadikan sebagai dukungan dari implementor seperti sumber daya manusia dapat dilihat dari sejauh mana kompetensi yang dimiliki serta dari sumber daya finansial dari implementor.

c. Disposisi, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan disposisi merupakan artian dari dimana implementor memiliki sebuah karakteristik dan watak dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Karakteristik sendiri dapat diartikan terkait dari kejujuran, komitmen, serta sifat demokratis. Implementor sendiri ketika memiliki watak yang baik dalam menjalankan kebijakan maka dapat dikatakan keinginan dari pembuat kebijakan dapat dilakukan sesuai dengan harapan dan apabila sebaliknya maka segala proses implementasi kebijakan dapat dikatakan kurang ataupun tidak efektif.

d. Struktur organisasi, dalam sebuah organisasi terkait yang menjalankan tugas sebagai implementasi kebijakan tentunya sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Hal yang menjadi aspek dari struktur organisasi yakni ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi birokrasi. Struktur organisasi diharapkan dapat dipahami oleh segala pihak dikarenakan jika sebuah struktur organisasi terlalu panjang yang menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit, berbelit serta kompleks maka dapat melemahkan organisasi tersebut sehingga organisasi tersebut tidak bergerak secara fleksibel dan cenderung lemah.

### **Over Dimension Over Loading (ODOL)**

*Over dimension* merupakan tindakan yang dilakukan dengan merubah kondisi awal dengan yang baru dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Over loading* sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memaksakan sesuatu yang tidak semestinya untuk dilaksanakan yang berakibat terjadi permasalahan tertentu. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai kendaraan yang melebihi jumlah kapasitas maksimum dengan tujuan untuk lebih mempermudah dalam proses operasional.

### **Angkutan Barang Industri**

Angkutan merupakan transportasi yang digunakan untuk melaksanakan kepentingan baik individu maupun kelompok. Angkutan sendiri dapat dikatakan sebagai kendaraan untuk memuat barang atau orang dan dalam bentuk apapun untuk menuju tempat satu dan ketempat lainnya. Penjelasan terkait dari “angkutan” dimana kata tersebut berasal dari istilah “angkut” yang dapat diartikan berarti mengangkat

atau membawa, memuat dan membawa atau mengirim Abdulkadir Muhammad dalam (Anas, 2021)

Warpani mengemukakan bahwa pengertian dari angkutan barang itu sendiri merupakan proses dimana memindahkan sebuah barang yang berasal dari tempat yang satu untuk dipindahkan ketempat lainnya. Pada angkutan barang dapat dibedakan dengan perjalanan orang yang dimana angkutan barang dibawa atau diangkut dengan jarak yang lebih jauh dan lebih sedikit pelanggan. Angkutan barang juga terdapat beragam jenis yang diangkut.(Septiani, 2022)

### **C. METODE PENELITIAN**

Pada pelaksanaan penelitian tentunya terdapat bagian terkait dengan jenis apa yang digunakan. Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian dengan menggunakan kata-kata dalam menganalisis hasil penelitian yang telah dilakukan. Jadi penulis melakukan penelitian dimana hasilnya dapat diperoleh melalui mengamati dilapangan atau observasi, wawancara dan dokumentasi. peneliti berfokus untuk mengetahui gambaran mengenai implementasi kebijakan terkait dengan *Over Dimension Over Loading* pada angkutan industri di Kabupaten Sidoarjo. Guna mengetahui hasil dari implementasi kebijakan penulis menggunakan keberhasilan implementasi dengan beberapa indikator yakni komunikasi. sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi .Hal ini bertempat dilokasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Terkait dengan Tempat penelitian dilakukan karena sesuai dengan rencana penelitian dan melihat permasalahan yang sesuai terkait bidang mengenai kebijakan tersebut dalam hal ini instansi terkait dan pelaksana kebijakan. Karena Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo selaku instansi yang menangani terkait dengan transportasi dan pengaturan salah satunya yakni kendaraan angkutan barang *Over Dimension and Over Loading*.

### **D. PEMBAHASAN**

Berdasarkan persoalan yang dibahas oleh peneliti mengenai implementasi kebijakan *over dimension and over loading* angkutan barang industri di Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo ada beberapa bidang yang menangani terkait dengan persoalan tersebut. Bidang tersebut antara lain yakni bidang pengendalian operasional dan keselamatan, bidang angkutan, UPT uji kendaraan bermotor. Beberapa bidang tersebut saling berkoordinasi dalam menangani terkait dengan kebijakan *over dimension and over loading* angkutan barang industri di Kabupaten Sidoarjo diantaranya mulai dari penindakan, sanksi, pengujian serta pemberian izin kendaraan yang melintas di jalan raya. Karena hal tersebut tentunya berdasarkan pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan.

Kemudian dalam implementasi kebijakan sendiri ada beberapa indikator dalam upaya melaksanakan aturan *over dimension and over loading*.

### **Komunikasi**

Melihat bahwa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya implementasi kebijakan *over dimension and over loading* menunjukkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo yakni Dinas Perhubungan berupaya untuk mengatasi kendaraan angkutan barang industri yang terbukti melanggar dan juga terus berupaya agar tidak ada kendaraan yang melintas dan terbukti menyalahi aturan tersebut. Dinas Perhubungan juga dalam hal ini dapat memberikan sebuah informasi dimana sebagai perusahaan yang terbukti melanggar mendapatkan surat peringatan hal ini menjadi bagian terpenting dikarenakan langsung pada pihak yang bersalah dan juga tidak akan membebani pada pengguna angkutan barang. Dinas Perhubungan juga memberikan informasi kepada masyarakat melewati media massa, media sosial dimana himbuan terhadap pengguna kendaraan untuk mematuhi aturan mengenai *zero odol* yang mana kebijakan *over dimension and over loading*. Komunikasi tersebut terus dilakukan oleh pihak Dinas Kabupaten Sidoarjo dimana terus berupaya untuk memberikan arahan agar tidak adanya melanggar *over dimension and over loading*. Sosialisasi tersebut terus dilakukan sampai dengan cara penindakan ketika adanya kendaraan yang melanggar.

### **Sumber Daya**

Implementasi kebijakan *over dimension and over loading* yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo melihat hal yang sudah dilakukan dan terjadi dilapangan tentunya hal tersebut sangat baik dalam proses pelaksanaannya. Sehubungan dengan itu, bahwa sumber daya manusia memang sangat dibutuhkan ketika dalam menjalankan suatu tugas apalagi sebuah aturan yang harus dilaksanakan. Pada dasarnya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sangatlah tepat bahwa ketika memiliki sumber daya yang memadai dan juga memberikan pengaruh besar ini sangat membantu terlaksananya suatu kebijakan. Hal tersebut dilakukan oleh staff dari Dinas Perhubungan dimana mereka sudah memahami terkait dengan kebijakan *over dimension and over loading* dan apa yang harus dilakukan dalam proses dilapangan seperti penindakan, pengecekan kendaraan dan memberikan teguran. . Dinas Perhubungan juga terus melakukan peningkatan terkait sumber daya yang ada dimana memberikan arahan kepada pegawai yang bertugas untuk terus menetapkan prinsip yang ada. Dalam penilaian sendiri bahwa selama kebijakan diterapkan sejauh ini sumber daya yang ada juga mampu melaksanakan dengan baik.

## **Disposisi**

Berdasarkan hal tersebut bahwa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mewujudkan kendaraan bebas dari over dimension and over loading memang sudah dilakukan dengan berupaya agar para pelaksana kebijakan dapat mematuhi aturan yang berlaku hal ini menunjukkan bahwa kebijakan harus dilaksanakan dengan baik karena ini dapat merugikan diberbagai pihak salah satunya infrastruktur jalan. Melihat yang terjadi dilapangan bahwa infrastruktur jalan yang ada di Lingkar Timur semakin kurang memadai hal ini dikarenakan banyaknya kendaraan yang melintas salah satunya kendaraan dengan membawa angkutan barang Pada pihak pengguna ataupun pengusaha sendiri sebagai pelaksana juga hal ini masih harus diperbaiki dikarenakan masih banyak kendaraan yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dari hasil penindakan yang mana banyak kendaraan masih tidak memperhatikan dan menjalankan aturan yang seharusnya. Kewajiban uji kendaraan berkala dan pelaksanaan muatan masih ada yang tidak sesuai. Hal ini harus menjadi perhatian oleh perusahaan agar bisa mematuhi aturan yang berlaku. Ketika pihak pengguna, pengusaha dan dinas terkait dapat bekerja sama dengan baik maka kebijakan tersebut dapat terlaksana secara efektif sehingga tujuan dapat berjalan dengan tepat.

## **Struktur Birokrasi**

Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan melakukan kerja sama untuk menindak pelanggar ini sangat baik mengingat ketika melakukan kerja sama tersebut dapat terbukti bahwa kenyataan dilapangan masih adanya kendaraan yang melakukan pelanggaran dikarenakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kerja tersebut antar instansi dapat memberikan sebuah hubungan baik kedepan ketika proses penindakan terjadi kendala diluar kendali sehingga ketika kerja sama antar kepolisian dapat berdampak langsung kepada pelanggar sejauh mana sanksi yang dapat diberikan.

## **E.KESIMPULAN**

Pada implementasi kebijakan over dimension and over loading angkutan barang industri yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo hal ini dilakukan sudah cukup baik. Berdasarkan terkait implementasi tersebut mulai dari memberikan sosialisasi, terkait dengan sumber daya pelaksanaan, sikap yang harus dilakukan serta kerja sama antar instansi dalam melakukan pengawasan terhadap angkutan barang yang diindikasikan melanggar aturan. Diharapkan bahwa Dinas Perhubungan dapat terus konsisten untuk melaksanakan kebijakan tersebut hal ini agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Kemudian Dinas

Perhubungan untuk meningkatkan dalam segi hal tersebut agar memperkuat kebijakan sehingga tidak ada lagi kendaraan yang melanggar di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Anas, M. R. B. (2021). *Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Pelaksanaan Pengaturan Waktu dan Rute Operasional Angkutan Barang di Kota Makassar*. FH UNIVERSITAS HASANUDDIN.

Indonesia, P. R. (2009). *uu\_no.22\_tahun\_2009.pdf*.

Krisna. (2021). *Mulai Tahun 2023, Kabupaten Sidoarjo Bebas Truk ODOL*. Suara Jatimpost.Com. <https://www.suarajatimpost.com/peristiwa-daerah/2023-sidoarjo-bebas-truk-odol>

Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI Press.

Septiani, S. (2022). *Sistem Pengawasan Pemanfaatan Jalan Terhadap Angkutan Barang Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi*. Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung.